

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan suatu Negara dengan Negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh Negara maju saja, namun juga Negara berkembang. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor impor. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.²¹

Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi perdagangan antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak.

²¹ <http://munirarber.blogspot.co.id/2014/01/artikel-perdagangan-internasional.html>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016

Perdagangan internasional mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Melalui perdagangan internasional dapat diraih banyak manfaat, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari perdagangan internasional diantaranya adalah dengan adanya spesialisasi, suatu negara dapat mengekspor komoditi yang ia produksi untuk dipertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Negara akan memperoleh keuntungan secara langsung melalui kenaikan pendapatan nasional dan pada akhirnya akan menaikkan laju output dan pertumbuhan ekonomi.

Manfaat tidak langsung dari perdagangan internasional diantaranya adalah (1) Perdagangan internasional membantu mempertukarkan barang-barang yang mempunyai pertumbuhan rendah dengan barang-barang luar negeri yang mempunyai kemampuan pertumbuhan yang tinggi, (2) Sebagai sarana pemasukan gagasan, kemampuan, dan keterampilan yang merupakan perangsang bagi peningkatan teknologi, dan (3) Perdagangan internasional memberikan dasar bagi pemasukan modal asing. Jika tidak ada perdagangan internasional, modal tidak akan mengalir dari negara maju ke negara sedang berkembang. Semua transaksi perdagangan internasional yang terjadi di suatu negara, terangkum dalam neraca perdagangan (*trade balance*) yang terdiri dari komponen ekspor dan impor barang dan jasa.

Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda Negara. Defenisi diatas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam defenisinya ia menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.²²

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atautransaksi dagang yang kompleks.²³ Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi.

²² <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perdagangan-internasional.html>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016

²³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*,hlm. 9

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Perbedaan Sumber Alam

Suatu negara mempunyai kekayaan alam yang berbeda, sehingga hasil pengolahan alam yang dinikmati juga berbeda. Oleh karena sumber kekayaan alam yang dimiliki suatu negara sangat terbatas, sehingga diperlukan tukar-menukar atau perdagangan.

b. Perbedaan Faktor Produksi

Selain faktor produksi alam, suatu negara mempunyai perbedaan kemampuan tenaga kerja, besarnya modal yang dimiliki, dan keterampilan seorang pengusaha. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan oleh suatu negara juga mengalami perbedaan, sehingga dibutuhkan adanya perdagangan.

c. Kondisi Ekonomis yang Berbeda

Karena adanya perbedaan faktor produksi yang mengakibatkan perbedaan biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat barang, maka bisa jadi dalam suatu Negara memerlukan biaya tinggi untuk memproduksi barang tertentu. Sehingga negara tersebut bermaksud mengimpor barang dari luar negeri karena biayanya dianggap lebih murah.

d. Tidak Semua Negara Dapat Memproduksi Sendiri Suatu Barang

Karena keterbatasan kemampuan suatu negara, baik kekayaan alam maupun yang lainnya, maka tidak semua barang yang dibutuhkan oleh suatu negara

mampu untuk diproduksi sendiri, untuk itulah diperlukan tukar-menukar antarbangsa.

e. Adanya Motif Keuntungan dalam Perdagangan

Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang selalu terdapat perbedaan. Adakalanya suatu negara lebih untung melakukan impor daripada memproduksi sendiri. Namun, adakalanya lebih menguntungkan kalau dapat memproduksi sendiri barang tersebut, karena biaya produksinya lebih mudah. Oleh karena itu, negara-negara tersebut akan mencari keuntungan dalam memperdagangkan barang hasil produksinya.

f. Adanya Persaingan Antarpengusaha dan Antarbangsa

Persaingan ini akan berakibat suatu negara meningkatkan kualitas barang hasil produksi dengan biaya yang ringan, sehingga dapat bersaing dalam dunia perdagangan.²⁴

Perdagangan atau pertukaran hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan/manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi perdagangan tersebut dari sudut kepentingan masing-masing, kemudian menentukan apakah ia mau melakukan perdagangan atau tidak. Perdagangan timbul karena salah satu atau kedua belah pihak melihat adanya manfaat/keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari perdagangan tersebut. Jadi, dorongan atau motif melakukan perdagangan adalah adanya kemungkinan diperolehnya manfaat tambahan tersebut (*gains from trade*).

²⁴ <http://www.sselajar.net/2012/03/perdagangan-internasional.html>, diakses pada tanggal 01 September 2016

Secara garis besar manfaat dari perdagangan internasional bagi suatu negara adalah sebagai berikut.

- a. Memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan.
- b. Mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi sendiri.
- c. Melaksanakan kegiatan ekspor dan impor.
- d. Menambah devisa negara dan hasil ekspor.
- e. Melakukan alih teknologi dari negara lain.
- f. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
- g. Meningkatkan pendapatan nasional (Pendapatan Nasional Bruto).

Kebijakan perdagangan internasional adalah merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (*current account*) daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang. Kebijakan perdagangan internasional timbul karena meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi antarnegara. Jadi, kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah/negara, baik langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi komposisi, arah, serta Bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud dapat berupa tarif, dumping, kuota, larangan impor, dan berbagai kebijakan lainnya.²⁵

²⁵ <http://www.sselajar.net/2012/03/kebijakan-perdagangan-internasional.html>, diakses pada tanggal 01 September 2016

Pengertian kebijakan perdagangan internasional diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Jadi dapat dikatakan arah kebijakan perdagangan internasional itu untuk mengatur perdagangan internasional agar sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah. Banyak macam atau ragam kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam bidang perdagangan internasional adapun tujuan kebijakan perdagangan internasional yang ingin dicapai oleh pemerintah dari kebijakan perdagangan internasional itu antara lain:

- a. Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari berbagai kemungkinan pengaruh buruk/negatif dari berbagai negara lain.
- b. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan.
- c. Melindungi lapangan kerja agar bisa tetap tersedia.
- d. Menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran internasional.
- e. Mampu mendorong laju ekspor.
- f. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
- g. Menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs.

Tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah :

- a. Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negative dari situasi perdagangan internasional yang tidak baik.
- b. Melindungi kepentingan industry di dalam negeri.

- c. Melindungi lapangan kerja.
- d. Menjaga keseimbangan BOP.
- e. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- f. Menjaga stabilitas nilai tukar

Macam-macam kebijakan perdagangan internasional yang biasa dilakukan pemerintah:

1. Tarif atau bea masuk

Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa setiap barang yang diimpor harus membayar pajak, yang dikenal sebagai tarif atau bea masuk. Tujuan penerapan tarif atau bea masuk adalah sebagai berikut :

- Menghambat impor barang-barang/ jasa luar negeri.
- Melindungi barang / jasa produksi dalam negeri.

Pajak atau bea masuk akan menambah harga jual suatu barang/ jasa impor, sehingga diharapkan harga barang produksi dalam negeri akan lebih murah dari harga barang produksi luar negeri yang diimpor tersebut. Hal ini dapat melindungi barang/ jasa produksi dalam negeri karena lebih murah dan lebih bisa bersaing untuk memperebutkan pelanggan.

- Menambah pendapatan pemerintah dari pajak.

2. Kuota

Adalah suatu kebijaksanaan untuk membatasi jumlah maksimum yang dapat diimpor suatu negara. Akibatnya:

- Naiknya harga barang impor dalam negeri

- Mempertinggi daya saing produksi dalam negeri dipasar dalam negeri
- Produksi dalam negeri meningkat

3. Larangan ekspor

Melarang ekspor ke luar negeri untuk jenis barang tertentu .

4. Larangan impor

Larangan produksi luar negeri masuk ke dalam suatu negeri, Akibatnya:

- Melindungi perusahaan dalam negeri dari kebangkrutan
- Menghindari/mengurangi defisit neraca pembayaran

5. Subsidi

Agar produksi di dalam negeri dapat ditingkatkan maka pemerintah memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri. Subsidi yang diberikan dapat berupa mesin-mesin, peralatan, tenaga ahli, keringanan pajak, fasilitas kredit, dll. Akibatnya:

- Harga produksi dalam negeri menjadi murah
- Mempertinggi daya saing produksi dalam negeri di pasar dalam negeri

6. Politik dumping

Dumping adalah salah satu kebijakan perdagangan internasional dengan cara menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang dijual di dalam negeri. Namun pelaksanaan politik dumping dalam praktik perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji (*unfair trade*) karena dapat merugikan orang lain.

7. Premi

Pengertian premi adalah “bonus” yang berbentuk sejumlah uang yang disediakan pemerintah untuk para produsen yang berprestasi atau mencapai target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya:

- Produksi dalam negeri dapat bersaing di luar negeri. Dumping
Menjual produksi dalam negeri di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri Akibatnya:
- Pemasaran lebih luas
- Menghabiskan stok barang

8. Politik dagang bebas

Pemerintah memberi kebebasan ekspor dan impor. Akibat:

- Mutu barang tinggi
- Harga relative murah

B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Indonesia dan Korea Selatan

1. Hubungan Internasional

Hubungan Internasional menurut Mohtar Mas’oed dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* menyatakan istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

Untuk dapat memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor Negara maupun non-negara, dalam interaksi internasional yang meliputi perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional.²⁶

²⁶ Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Pustaka LP3S, Yogyakarta, 1994, hlm. 204.

Menurut Robert Jackson dan George Sorensen dalam bukunya *Pengantar Studi Hubungan Internasional* menyatakan bahwa Hubungan Internasional adalah “adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global”.²⁷

Sementara itu Hubungan Internasional menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* berpendapat sebagai berikut:

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.²⁸

Robert Jackson dan George Sorensen juga mengungkapkan bahwa Hubungan Internasional mempunyai pendekatan tradisional yang salah satunya adalah Ekonomi Politik Internasional yang bergerak pada asumsi bahwa Hubungan Internasional dapat dicirikan secara fundamental sebagai dunia sosio-ekonomi dan tidak hanya dunia politik dan militer.²⁹ Secara umum Ekonomi Politik Internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional, yang muncul akibat

²⁷ Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Terjemahan Dadan Suryadipura) Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

²⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan MochamaYani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 3-4.

²⁹ Robert Jackson dan George Sorensen, *Op.Cit.*, hlm. 7.

berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional. Ekonomi Politik Internasional secara sederhana dapat diartikan juga sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. Robert Gilpin mendefinisikan konsep Ekonomi Politik Internasional sebagai “Dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi) dimana terjadinya hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi. Negara dan pasar saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional”.³⁰

Menurut Mochtar Masoed dalam bukunya *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, mendefinisikan tentang Ekonomi Politik Internasional sebagai berikut:

Tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena dengan ekonomi, antar negara dan pasar, antara lingkungan domestik dengan internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat, ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan, sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi.³¹

Teori selanjutnya yang mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan penelitian ini adalah Ekonomi Internasional, menurut R.E.A Ma'moer dalam bukunya *Ekonomi Internasional*, adalah:

Tujuan dari ekonomi internasional adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan dari ekonomi internasional merupakan kerjasama membantu antar negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi akan terpenuhi.³²

³⁰ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op.Cit.*, hlm 75-76.

³¹ Mochtar Masoed, *Ekonomi Poilitik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

³² R.E.A Ma'moer, *Ekonomi Internasional*, Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 1.

Pentingnya studi Ekonomi Internasional karena pada saat ini pengaruh globalisasi ekonomi dunia yang ditandai ciri-ciri atau karakter yaitu:

- a. Keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi.
- b. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar dimana adanya perusahaan Multi Nasional.
- c. Persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan: produktifitas, efisiensi dan efektif yang optimal.

Salah satu kajian utama dari studi hubungan internasional adalah Organisasi Internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. WTO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan dan terbentuk pada 1 januari 1995. WTO mengatur sekaligus mengawasi arus perdagangan yang terjadi diantara negara-negara anggotanya serta memiliki persetujuan-persetujuan mengenai peraturan perdagangan internasional.

Banyu Perwita dan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai:

Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggoa (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu orgnasasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor negara.³³

³³ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 92.

Sementara Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu “Pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini”³⁴

Dalam mukadimahny, WTO sebagai organisasi yang secara khusus melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional mempunyai maksud dan tujuan bersama, yaitu sebagai berikut:

Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, terutama negara terbelakang, mendapatkan bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.³⁵

WTO (*World Trade Organization*) sebagai suatu organisasi internasional yang menangani dan berfokus pada permasalahan perdagangan internasional sangat berperan penting dalam hal mengatur segala regulasi mengenai arus perdagangan internasional dan memiliki tujuan untuk mereduksi peran pemerintah dalam restriksi kebijakan perdagangan internasional.

³⁴ *Ibid*, hlm. 93.

³⁵ *Agreement Establishing The World Trade Organization 1994*.

Tulus Tambunan mendefinisikan Perdagangan Internasional sebagai berikut:

Perdagangan Internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor, perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (travel), asuransi, pembayaran bunga dan remittance seperti gaji Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia serta fee atau royalti teknologi (lisensi).³⁶

Menurut ahli ekonomi klasik, perdagangan internasional merupakan salah satu kontribusi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, hal tersebut dikarenakan:

1. Perdagangan internasional mendorong produktifitas dan dapat memperluas pasar.
2. Memasarkan kelebihan produksi dalam negeri.

2. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan

Hubungan Indonesia dengan Korea Selatan adalah hubungan bilateral luar negeri antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kedua negara memiliki visi, nilai, dan keinginan untuk berkontribusi pada komunitas internasional sebagai kekuatan menengah yang sama. Kedua negara adalah anggota dari G-20 dan APEC. Indonesia dan Korea Selatan secara resmi membentuk hubungan diplomatik pada 17 September 1973. Korea Selatan memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar Seoul.

Pertumbuhan perdagangan dan investasi yang cepat membuat kedua pemerintahan menyetujui persekutuan strategis pada tahun 2006. Indonesia dan

³⁶ F. Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1996), hlm. 12.

Korea Selatan berinvestasi dalam berbagai proyek pengembangan militer gabungan, termasuk Jet Tempur KFX/IFX. Perusahaan Korea Selatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) sudah mencapai tahap akhir negosiasi kontrak untuk memasok Indonesia dengan tiga kapal selam Type-209. Ini akan menjadi transaksi pertahanan bilateral terbesar, dengan nilai US\$1,1 milyar.

Pada masa lampau, hubungan kedua negara hanya berkembang di area perdagangan dan investasi seperti sektor. Sekarang kerjasama keduanya sudah berkembang ke berbagai proyek raksasa dan industri canggih. Dengan nilai US\$27 milyar dalam perdagangan bilateral, Korea Selatan menjadi rekan dagang terbesar Indonesia keempat pada tahun 2012. Korea Selatan juga menjadi penanam modal asing terbesar ketiga di Indonesia, dengan nilai \$1,94 milyar investasi. Ada banyak perusahaan Korea Selatan yang menanam modal dan beroperasi di Indonesia seperti Miwon (*Daesang Corporation*), Lotte, Yong Ma, Hankook Tire, Samsung, LG, Kia Motors dan Hyundai. Pada tahun 2011, Hankook Tire mengumumkan investasinya sebesar US\$353 juta untuk sebuah pabrik produksi yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.³⁷

Hubungan bilateral (Inggris: *bilateral relations* atau *bilateralism*) adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara 2 Negara.

³⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Indonesia_dengan_Korea_Selatan, diakses pada tanggal 08 September 2016

3. Politik

Dari sisi lingkaran konsentris Politik Luar Negeri RI, Korea Selatan yang terletak di kawasan Asia Timur berada di lingkaran kedua setelah ASEAN. Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis yang penting bagi Indonesia. Hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara meningkat tajam dalam dekade terakhir ini terutama sejak kedua negara memasuki kemitraan strategis yang ditandai dengan penandatanganan *Joint Declaration on Strategic Partnership* oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korsel Roh Moo Hyun pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta. *Joint Declaration* mencakup 3 (tiga) pilar kerjasama, yaitu: 1) kerjasama politik dan keamanan, 2) kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi; dan 3) kerjasama sosial budaya.

Di bidang politik, hubungan dan bobot kerjasama politik RI-ROK terus terjaga dan menguat dengan intensitas kunjungan high *dignitaries* kedua negara baik pejabat tinggi RI ke Korea Selatan maupun sebaliknya yang cukup tinggi. Hal ini nampak antara lain:

- b. Kunjungan Presiden RI ke Busan dalam rangka *Commemorative Summit* ASEAN-ROK ke-25 pada 10-12 Desember 2014.

Pertemuan Puncak ASEAN-ROK meletakkan arah hubungan dan kerjasama ke depan. Dalam hal ini antara lain, dicatat penegasan kembali promosi peningkatan dialog kemitraan ASEAN-ROK untuk kemitraan strategis yang bermakna, menguntungkan dan bersahabat, terus mendorong pendirian Komunitas ASEAN, meningkatkan konektivitas, mengurangi gap pembangunan dan memperkuat ASEAN Sekretariat dalam mewujudkan

ASEAN yang didasarkan pada aturan, berpusat pada masyarakat, secara ekonomi terpadu, kondusif secara politik dan bertanggung jawab secara sosial. Ditegaskan pula dukungan terhadap *ASEAN-Centrality* dalam perkembangan arsitektur kawasan menuju keamanan.

Di bidang politik keamanan, para Pemimpin ASEAN dan ROK menekankan pentingnya *trust building* untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Mereka juga menyambut baik inisiatif ROK mengenai *Trust-Building Process* di Semenanjung Korea, unifikasi secara damai di Semenanjung Korea, serta *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative* (NAPCI) dalam upaya menciptakan perdamaian dalam jangka panjang di Semenanjung Korea dan di kawasan. Para Pemimpin juga terus mendukung proses denuklirisasi di Semenanjung Korea dan mendorong Republik Demokratik Rakyat Korea untuk mengikuti aturan internasional seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB dan *Joint Statement Six Party Talks* tanggal 19 September 2005. Diharapkan para pihak dapat memulai kembali pembahasan dalam *Six Party Talks*.

- c. Pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Presiden Park Geu-hye pada 11 Desember.

Pada pertemuan bilateral Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Presiden Park Geun-hye pada 11 Desember 2014, di Busan, Presiden Park menyampaikan bahwa Indonesia adalah mitra penting kerjasama dan mitra dagang kunci bagi ROK. Kedua negara telah memperdalam kemitraan strategis bilateral dengan kerjasama aktif pada industri pertahanan dan

berharap kerjasama bilateral akan terus berkembang. Dalam pertemuan tersebut Kedua Pemimpin:

- Sepakat untuk menghidupkan kembali *Joint Commission Meeting* (JCM) pada tingkat Menlu kedua negara dan Pertemuan akan dilaksanakan pada awal tahun depan. Dengan adanya mekanisme JCM ini maka akan lebih mudah bagi kedua negara untuk memantau perkembangan kerja sama kedua negara dan menindaklanjuti kesepakatan yang disetujui pada tingkat Leader.
 - Sepakat pula untuk meningkatkan kerja sama industri pertahanan, terutama transfer pengetahuan dan teknologi terkait dengan pembangunan bersama kapal selam dan pesawat tempur yang telah berjalan saat ini.
 - ROK menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kesatuan Penjaga Pantai dan galangan kapal di Indonesia.
 - Kedua Pemimpin menyambut baik penandatanganan Persetujuan Pembentukan Komite Bersama di bidang e-Government dan reformasi birokrasi.
 - Presiden RI mendukung penuh upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas pada tingkat kawasan dan global, termasuk di Semenanjung Korea.
- d. Penganugerahan "*The Grand Order of Mugunghwa*" oleh Presiden Park Geun-hye kepada mantan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada

19 November 2014. Penghargaan tersebut diberikan berkat peran aktif dan kontribusi signifikan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dalam memajukan dan memperkuat hubungan RI-ROK baik dalam konteks bilateral, regional maupun multilateral.

- e. Pengesahan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua *Global Green Growth Institute* (GGGI) yang baru menggantikan mantan ketua GGGI yang juga mantan PM Denmark Lars Lokke Rasmussen dengan masa jabatan dua tahun, pada 18 November 2014.
- f. Kunjungan Ketua Majelis Nasional ROK Mr. Chung Ui-hwa ke Jakarta dan courtesy call ke Presiden RI pada 22 Desember 2014. Dalam pertemuan tersebut, Mr. Chung Ui-hwa menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kerjasama maritim yang menjadi prioritas Pemerintah RI.
- g. Kunjungan Ketua DPD RI Irman Gusman dan Delegasi ke ROK ke ROK dan bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Republik Korea (ROK) Hon. Chung Ui Hwa, yang merupakan orang kedua di ROK pada 19 November 2014.

Dalam kunjungan tersebut dijajagi kerjasama di bidang *capacity building* dalam bentuk program-program pelatihan kepada anggota staf Sekretariat Jenderal maupun anggota DPD RI, pembangunan sistem *IT-based paperless governance* dan *e-voting*. Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Mr. Park Heong-joon menyambut sangat positif usulan kerja sama tersebut. Pihaknya siap membantu pelatihan dan pembangunan sistem tata kelola pemerintahan

yang berbasis teknologi informasi. Kedua belah pihak akan menindaklanjuti dan mempersiapkan draft MOU untuk landasan kerja sama ini.

- h. Kunjungan Wakil Ketua BPK Bapak Sapto Amal Damandari dan Delegasi ke ROK dan bertemu Ketua Board of Audit and Inspection ROK Hon. Hwang Chan-hyun, Desember 2014. Dalam kunjungan tersebut disepakati kerjasama program pelatihan para auditor dan pegawai BPK untuk meningkatkan profesionalitas dan pengembangan SDM. Direncanakan pada bulan Januari Sekretaris Jenderal Board of Audit and Inspection ROK akan berkunjung ke Jakarta dan pada Februari pengiriman peserta pelatihan ke Education and Training Institute Board of Audit and Inspection ROK di Paju.
- i. Kunjungan Wakil Ketua DPD RI GKR Ratu Hemas dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI ke Korea Selatan tanggal 16-17 September 2014.

4. Ekonomi

Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Korea telah menandatangani the *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* di Jakarta pada tanggal 4-5 Desember 2006. *Joint declaration* tersebut meliputi 3 pilar kerjasama, yaitu: kerjasama politik dan keamanan; kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi; serta kerjasama sosial budaya. *Joint declaration* tersebut mendorong kedua negara untuk lebih mempererat persahabatan dan menciptakan kerjasama yang lebih

kongkrit. Sejak saat itu, tren investasi dan perdagangan antara kedua negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk mewujudkan pilar kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, kedua negara setuju untuk membentuk *Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation* (JTF-EC) yang telah menyelenggarakan pertemuan tahunan sejak tahun 2007. Pada tahun 2011, Indonesia-Korea JTF-EC direvitalisasi menjadi *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM) yang melakukan pertemuan dua kali setahun untuk mengakomodasi perkembangan yang signifikan dalam kerjasama ekonomi kedua negara. Pertemuan pertama WLTFM telah dilaksanakan di Bali pada tanggal 18-19 Mei 2011.

Untuk memonitor implementasi dari berbagai kesepakatan yang dicapai oleh setiap *working group*, kedua negara sepakat untuk mendirikan sekretariat bersama WLTFM di Jakarta. Upacara peresmian sekretariat bersama dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 pada saat pertemuan ke-3 WLTFM di Jakarta. Anggota dari sekretariat bersama adalah pejabat dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI dan Kementerian Knowledge Economy Republik Korea sebagai *focal point* WLTFM untuk masing-masing negara.

Dengan terbinanya hubungan ekonomi yang erat selama bertahun-tahun di antara kedua negara, masyarakat Korea Selatan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Data menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia terus meningkat pada tahun 2013. Pada tahun tersebut, nilai investasi dari Korsel mencapai USD 2,2 miliar. Nilai tersebut telah melebihi nilai investasi Korsel pada tahun 2012 dan menempatkan

Korsel sebagai investor terbesar ke-4 setelah Jepang, Singapura dan Amerika Serikat.

Investasi Korsel di Indonesia terutama pada sektor industri elektronik, telekomunikasi, konstruksi, otomotif, pertambangan, migas, air bersih, perbankan dan perhotelan. Baru-baru ini, terdapat investasi yang bernilai miliaran US dolar dari perusahaan-perusahaan besar Korsel seperti POSCO, Hankook Tire, Lotte Group dan Cheil Jedang Group di Indonesia. Hal tersebut membuktikan adanya kepercayaan yang tinggi dari para investor Korsel kepada Indonesia. Keputusan investasi tersebut diikuti bukan hanya oleh perusahaan afiliasi dan perusahaan vendor dari perusahaan besar Korsel, tetapi juga oleh perusahaan Korsel lainnya.

Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2011, volume perdagangan antara kedua negara mengalami penurunan akibat melemahnya perekonomian global yang dirasakan dampaknya oleh banyak negara di dunia. Total volume perdagangan antara Indonesia-Korea tahun 2013 sebesar US\$ 23 milyar, turun dari tahun 2012 dimana nilai perdagangan mencapai US\$ 27,02 milyar. Walaupun tampak ada gejala penurunan pada angka perdagangan bilateral, kedua pemerintahan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral dan telah menargetkan bahwa nilai perdagangan kedua negara akan mencapai US\$50 milyar pada tahun 2015 dan US\$100 milyar pada tahun 2020.

Pencapaian target ini didukung oleh rencana kedua negara untuk membentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk melengkapi perjanjian ASEAN-ROK *Free Trade Area* (FTA) yang telah ada

sebelumnya. Sebuah kelompok studi untuk menilai kelayakan CEPA telah dibentuk pada saat kunjungan Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI ke Seoul pada bulan Februari 2011. Setelah beberapa kali pertemuan kelompok studi, laporan akhir kelompok studi tersebut disahkan pada pertemuan pertama WLTFM di Seoul bulan Oktober 2011. Rangkaian seminar telah dilaksanakan di masing-masing negara pada akhir tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2012 untuk mensosialisasikan hasil studi kelayakan kelompok studi kepada masing-masing pemangku kepentingan nasional.

Di sela-sela *Nuclear Security Summit* di Seoul pada bulan Maret 2012, kedua Pemimpin negara melakukan pertemuan bilateral dan sepakat untuk memulai perundingan Indonesia-Korea CEPA (IK-CEPA). Perundingan pertama IK-CEPA dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2012 di Jakarta untuk membahas *Term of Reference* negosiasi IK-CEPA dan cakupan IK-CEPA, yaitu: *Trade in Goods, Rules of Origin, Custom, Trade Facilitation, Investment, Intellectual Property Rights, Sustainable Development and Competition*. Isu *Trade Remedies and Cooperation* masih merupakan isu pending yang akan didiskusikan pada negosiasi berikutnya. Sebagai tindak lanjut, negosiasi kedua IK-CEPA telah dilaksanakan pada bulan Desember 2012.

Negosiasi IK-CEPA merupakan awal babak baru dari hubungan bilateral Indonesia dan Korea. Menurut laporan kelompok studi, kedua negara akan menikmati keuntungan dari IK-CEPA, dimana Indonesia akan menikmati manfaat ekonomi sebesar USD 10,6 miliar dan peningkatan PDB sebesar 4,37%. Sementara itu, Korsel akan mendapatkan manfaat ekonomi sebesar USD 1,5

miliar dan peningkatan PDB sebesar 0,13%. Perundingan Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) putaran Ketujuh telah terlaksana di Seoul, Korea, pada tanggal 21-28 Februari 2014. Putaran ini sebagai lanjutan dari putaran keenam IKCEPA yang diadakan di Bali pada tanggal 4-8 Nopember 2013.

Pada tanggal 29-30 September 2014 di Seoul, telah diadakan pertemuan ke-5 Indonesia-Korea Working Level Task Force (WLTF) on Economic Cooperation yang dipimpin bersama oleh Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan *Deputy Minister for Trade, Ministry of Trade, Industry and Energy Korea*. Pertemuan ke-5 WLTF didahului oleh pertemuan enam Working Group terdiri dari WG on Trade and Investment; WG on Industrial Cooperation, WG on Construction and Infrastructure, WG on Environment Cooperation, WG on Agriculture, Forestry and Fisheries dan WG on Policy Support and Financing dan 3 Working Group yang telah bertemu pada bulan Juni dan awal September 2014 yaitu WG on Energy and Mineral Resources, WG on Defense Industry, dan WG on Green Car.

Dalam pertemuan ke-5 WLTF tersebut, kedua pihak telah membahas berbagai proyek yang sedang berlangsung maupun proyek-proyek baru yang akan dikerjasamakan. Kedua pihak sepakat untuk mengakselerasi kerjasama bilateral dengan memprioritaskan 10 proyek utama yaitu Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus, Kerjasama Industri Perkapalan, *Agro-based Multi-Industry Cluster* (MIC), kerjasama mesin-mesin pertanian, Jakarta Giant Sea Wall, Pekanbaru City

Water Suppy, Restorasi Kali Ciliwung di Jakarta, Restorasi Sungai Citarum, Karian Water Conveyance dan Coal-fired Steam Power Plant.

Pertemuan ke-5 Plenary WLTF juga sepakat untuk memperpanjang TOR pembentukan Joint Secretariat yang akan segera berakhir sehingga Joint Sekretariat yang telah berjalan sejak bulan Februari tahun 2012 tersebut dapat terus berjalan untuk menjembatani berbagai kerjasama antara kedua negara. Pertemuan sepakat untuk melaporkan hasil pertemuan WLTF ini pada pertemuan tingkat Menteri antara kedua negara yang akan diadakan di Indonesia pada tahun 2015.

5. Sosial Budaya

Di sektor sosial budaya terdapat sejumlah program saling kunjung antara kelompok seni budaya kedua negara. Korsel sangat aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi budaya internasional di berbagai kota di Korea dan kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok seni tari dan budayawan Indonesia untuk berpromosi di negeri ginseng ini. Beberapa ajang promosi budaya yang cukup besar di Korsel adalah Korea Travel Fair, Hi Seoul, Busan Travel Fair, Busan Film Festival dan lainnya. Indonesia telah meratifikasi perjanjian kerjasama kedua negara di bidang budaya yang ditandatangani tahun 2000. MOU di bidang pariwisata juga telah disepakati oleh kedua negara tahun 2006. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, bulan Mei 2008 telah diadakan Pertemuan Komite Budaya Indonesia Korsel di Yogyakarta.

Di bidang pendidikan, Indonesia dan Korsel telah menandatangani MOU di bidang pendidikan dalam kunjungan Presiden Lee Myung Bak ke Jakarta tahun

2009. Bentuk kerjasama dalam MOU tersebut adalah proyek penelitian bersama, pertukaran pengajar, pelajar, peneliti dan ahli lainnya, pertukaran informasi, pertemuan berkala, konperensi, seminar, pameran, pertukaran bahan-bahan yang diperlukan, pendirian pusat riset bersama, pendidikan, pelatihan dan bentuk kerjasama pendidikan lainnya. Terakhir Indonesia dan Korsel juga telah menandatangani MOU kerjasama di bidang industri kreatif pada kunjungan presiden Park Geun Hye ke Jakarta tahun 2013. MOU tersebut adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang industri kreatif. Setelah MOU tersebut di tandatangi diharapkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dapat lebih meningkat lagi terutama di bidang seni, kerajinan, musik, film, dan video games.

Jumlah mahasiswa dan pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Korsel terus meningkat setiap tahun. Tahun 2004 jumlah mahasiswa Indonesia di Korsel hanya sekitar 70 orang meningkat menjadi sekitar 1200 siswa sampai bulan Januari 2015. Jumlah mahasiswa Korsel yang belajar di Indonesia juga terus bertambah setiap tahun, tersebar di berbagai perguruan tinggi diseluruh Indonesia. Mahasiswa Korsel yang belajar di Indonesia melalui program Darmasiswa yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga terus meningkat. Selain itu terdapat program pendidikan singkat dari Kementeri Luar Negeri yaitu Beasiswa Budaya Indonesia yang bertujuan lebih mengenalkan seni budaya Indonesia kepada generasi muda Korsel. Minat mahasiswa Korsel untuk mempelajari bahasa Indonesia juga meningkat terlihat dari banyaknya pendaftar

untuk mengikuti program pendidikan bahasa Indonesia di BIPA Universitas Indonesia.

Potensi pariwisata Korsel sangat tinggi. Menurut data Korea Tourism Organization jumlah orang Korsel yang berwisata ke luar negeri setiap tahunnya lebih dari 14,5 juta orang (tahun 2014). Tingginya tingkat kemakmuran dengan pendapatan percapita lebih dari US\$ 33.100 berdasarkan purchasing power parity yang di keluarkan oleh IMF, menyebabkan kebutuhan untuk berwisata ke luar negeri tidak lagi kebutuhan sekunder tapi merupakan kegiatan yang dipersiapkan setiap tahun. Jumlah wisatawan Korsel ke Indonesia terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, walaupun sedikit berfluktuasi akibat sejumlah peristiwa di dalam negeri Indonesia antara isu terorisme, bencana alam dan wabah penyakit flu burung. Data terakhir tahun 2014 jumlah wisatawan Korsel yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 328.122 orang, keenam terbesar setelah wisatawan Singapura, Malaysia, Australia, Tiongkok dan Jepang.

Pada tahun 2013 lalu Indonesia dan Korsel merayakan 40 tahun hubungan diplomatik. Acara puncak dari perayaan itu adalah Gala Dinner yang diadakan di hotel Lotte Seoul pada tanggal 25 September 2013. Gala Dinner ini dihadiri oleh lebih dari 400 undangan dari berbagai kalangan setempat termasuk Menteri Perdagangan dan Industri Korsel. Menko Perekonomian RI Hatta Rajasa hadir dalam Gala Dinner usai mengikuti pertemuan CEPA hari sebelumnya. Menko didampingi oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan serta Agus Yudhoyono menjadi tamu kehormatan dalam Gala Dinner tersebut. Batik fashion show oleh Alleira dengan menampilkan Anissa

Pohan sebagai model utama merupakan salah satu acara gala dinner. Artis Indonesia lainnya yang tampil malam itu adalah Angels Percussion dan kelompok angklung Daeng Udjo. Selain itu ada artis Korsel yaitu Eru yang tampil bersama Atiqah Hasiholan dan Taejina yang menyanyikan sejumlah lagu. Acara ini merupakan salah satu bentuk soft power diplomacy yang di selenggarakan KBRI Seoul dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Korea Selatan.

Masih dalam rangkaian peringatan 40 tahun hubungan diplomatik RI-Korea, pada tanggal 26 September 2013, Menko Perekonomian meresmikan pembukaan Festival Film Indonesia di bioskop CGV Seoul. Dalam festival film yang pertama kali diadakan di Korsel, sebanyak 9 film Indonesia diputar selama 10 hari di bioskop CGV di kota Seoul dan Ansan. Ini adalah terobosan baru dalam mempromosikan film Indonesia di negerinya K-Pop. Pada tahun 2013 untuk melakukan branding, positioning dan memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Korea Selatan, Duta Besar RI Seoul menyadari bahwa melalui celebrity-celebrity Korea Selatan merupakan media yang paling baik dan efektif karena otomatis akan di siarkan oleh banyak media masa bahkan oleh televisi Korea Selatan. Oleh karenanya pada bulan Juni 2013, KBRI Seoul mengangkat seorang artis terkenal Korsel, Lee Beum Soo dan istrinya Lee Yoon Jin menjadi Ambassador of Goodwill Indonesia yang tugasnya antara lain membantu memperkenalkan dan mempromosikan Indonesia kepada masyarakat Korsel. Pada saat acara pengangkatan Lee Beum Soo tersebut diberitakan oleh berbagai media cetak dan televisi Korea Selatan. Peristiwa ini juga dilakukan karena KBRI

melihat bahwa Negara ini mempunyai potensi bagus untuk menjadi lahan promosi budaya Indonesia. Pendapatan perkapita yang cukup tinggi dengan predikat sebagai Negara maju membuat masyarakat Korsel mempunyai keingintahuan yang besar terhadap budaya asing.

Selanjutnya pada bulan Januari 2014, untuk lebih mempromosikan dan memperkenalkan Indonesia dikalangan masyarakat Korsel, KBRI Seoul mengangkat Tae Jin A seorang artis terkenal sebagai Special Friend of Indonesia. Pada acara pemberian plakat penghargaan tersebut juga ditayangkan lebih dari 20 media cetak dan televisi di Korsel. Sebagai Special Friend of Indonesia, Tae Jin A berkenan menjadi media promosi bersama anaknya Eru yang juga merupakan penyanyi muda cukup terkenal di Korsel dan Indonesia. Salah satunya ialah memasang photo keduanya di depan Kantor KBRI Seoul dengan tanpa biaya. Lalu pada bulan Agustus 2014, KBRI Seoul juga memberikan penghargaan Special Friend of Indonesia kepada putra Tae Jin A yang merupakan penyanyi Korea Selatan terkenal Eru karena telah banyak berperan dalam mempromosikan dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea melalui pertukaran kebudayaan.

Selama tahun 2014 dalam rangka mempromosikan Indonesia kepada masyarakat Korea Selatan, selain kegiatan-kegiatan promosi rutin ada beberapa kegiatan besar yang dilakukan KBRI Seoul antara lain Open House Seoul yang bekerjasama dengan pemda kota Seoul pada bulan Agustus 2014 dan Indonesia Food Festival yang bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif pada bulan Oktober 2014.

Selain acara diatas, KBRI Seoul juga mengadakan beberapa acara promosi budaya dengan bekerjasama dengan masyarakat Indonesia antara lain seperti acara One Indonesia Day bulan Agustus 2014 yang dihadiri oleh 5000 masyarakat Indonesia di Korea Selatan dan diperkirakan ada sekitar 1000 pengunjung warga Korea datang pada kegiatan tersebut, Indonesian Week di Kyunghee University bulan Juni 2014 yang diperkirakan dikunjungi oleh sekitar 500 pengunjung dan Indonesian Week pada bulan November 2014 di Seoul National University yang dikunjungi oleh lebih dari 1000 pengunjung. Selain pertunjukan seni budaya dalam rangka mempromosikan Indonesia kepada masyarakat Korea Selatan, pada tahun 2014, Duta Besar RI juga memberikan kuliah umum mengenai Indonesia di beberapa universitas terkemuka di Korea Selatan, yaitu antara lain di Kyung Hee University, Sookmyung Woman's University, Kyungsoong University, Seoul National University (SNU) dan Korea Institute of Science and Technology (KIST). Pada setiap kuliah umum yang dilakukan selalu dipadati oleh dosen dan mahasiswa Korea yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Indonesia.

6. Ketenagakerjaan

Korea Selatan sebagai negara industri memerlukan berbagai sumber daya, tidak hanya sumber daya alam yang sebagian diimpor karena sangat sedikitnya sumber daya alam Korsel, negara ini juga mendatangkan tenaga kerja asing untuk menjalankan mesin-mesin industrinya. Disamping kurangnya angkatan kerja yang tersedia, masyarakat Korsel yang sudah mempunyai tingkat kemakmuran yang tinggi umumnya kurang berminat untuk bekerja di sektor industri terutama bagian pekerjaan yang berkategori *dangerous, dirty dan difficult* (3D). Untuk memenuhi

kebutuhan sektor industri yang sebagian besar adalah usaha kecil dan menengah maka dibukalah pintu masuk bagi tenaga kerja asing. Sampai saat ini terdapat 15 negara termasuk Indonesia yang mengirimkan tenaga kerjanya ke negeri ginseng ini.

Indonesia mulai mengirim TKI ke Korsel sejak tahun 1994 melalui mekanisme yang disebut *Industrial Trainee Program*. Disebut sebagai *trainee* karena waktu itu undang-undang ketenagakerjaan Korsel belum membolehkan tenaga kerja asing bekerja di Korsel. Baru tahun 2004 Korsel menerima secara resmi kehadiran tenaga kerja asing melalui skema EPS = *Employment Permit System*. Indonesia menandatangani MOU EPS dengan pihak Korsel 13 Juli 2004 untuk pengiriman TKI dengan format G to G. MOU ini sudah diperpanjang dua kali yaitu tahun 2008 dan 2012. Dibawah MOU ini, pengiriman dan penerimaan TKI dilakukan pemerintah Indonesia (BNP2 TKI) dan pemerintah Korsel (HRDK) sehingga tidak ada keterlibatan Pengerah Jasa TKI dalam pengiriman TKI ke Korsel sejak skema EPS yang G to G dijalankan.

Sampai akhir 2014 terdapat sekitar 35 ribu tenaga kerja Indonesia di Korsel. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja lokal untuk jenis pekerjaan industri kecil menjadi peluang yang potensial bagi tenaga kerja asing. Korsel sedikitnya membutuhkan 100 ribuan tenaga kerja asing setiap tahun. Setiap negara tidak dapat menyuplai tenaga kerja sebanyak-banyaknya ke Korsel karena adanya kuota bagi setiap negara yang ditetapkan oleh pemerintah Korsel. Indonesia mempunyai kuota sebesar 9000 orang setiap tahun.

Sebaliknya, saat ini terdapat sekitar 50 ribu warga negara Korsel di Indonesia dengan sekitar 2.500 perusahaan untuk segala ukuran. Saat ini warga Korea Selatan merupakan warga asing terbanyak di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, investasi Korsel di Indonesia meningkat pesat sehingga kini Korsel investor ketiga terbesar setelah Singapura dan Jepang.

